

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Berikut dibawah ini dijelaskan mengenai variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

2.1.1 Kualitas Sumber Daya Manusia

Berikut dijelaskan mengenai definisi serta indikator kualitas sumber daya manusia seperti dibawah ini :

2.1.1.1 Definisi Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Imam Mulyana (2010:96) menyatakan bahwa kualitas adalah kesesuaian dengan standar diukur berbasis kadar ketidaksesuaian serta dicapai melalui pemeriksaan.

Menurut Eddy Soeryanto Soegoto (2014:306) sumber daya manusia merupakan individu-individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi.

Selain itu, sumber daya manusia menurut Wirawan (2015:18) adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi.

Maka dari itu, Muhammad Dawam Rahardjo (2010:18) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia yaitu :

“Kualitas sumber daya manusia itu tidak hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya.”

Sedangkan, menurut Harbani Pasolong (2013:5) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan moral yang tinggi.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan suatu standar yang diukur bagi individu melalui pendidikan, pengalaman, serta sikapnya dalam sebuah organisasi.

2.1.1.2 Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Muhammad Dawam Rahardjo (2010:18) karakteristik sumber daya manusia yang berkualitas antara lain :

1. Kualitas Intelektual (Pengetahuan dan Keterampilan) meliputi :
 - a. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan industrialisasi.
 - b. Memiliki pengetahuan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa daerah dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing.
2. Pendidikan.
 - a. Memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
 - b. Memiliki tingkat ragam dan kualitas pendidikan serta keterampilan yang relevan dengan memperhatikan dinamika lapangan kerja baik yang ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

Menurut Sedarmayanti (2009:53) untuk mengukur kualitas sumber daya manusia terdapat beberapa kriteria dalam ukuran-ukuran meliputi :

1. Kemampuan fisik (kesehatan)
Kemampuan fisik adalah kemampuan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Adapun indikator dalam mengukur kemampuan fisik (kesehatan) ini meliputi :

- a. Memiliki kesehatan yang baik serta kesegaran jasmani.
 - b. Memiliki tingkat kehidupan yang layak dan manusiawi.
2. Kemampuan Non fisik, meliputi :
- a. Kemampuan Intelektual (kecerdasan)
Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Adapun indikator dalam mengukur kemampuan intelektual (kecerdasan) ini meliputi :
 - 1. Memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
 - 2. Memiliki tingkatan ragam dan kualitas pendidikan serta keterampilan yang relevan dengan memperhatikan dinamika lapangan kerja, baik yang tersedia di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
 - 3. Memiliki penguasaan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa ibu (daerah) dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing.
 - 4. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan industrialisasi.
 - b. Kemampuan Psikologis (mental)
Kemampuan psikologis adalah kemampuan yang berkaitan dengan etika, perilaku, sikap, serta fungsi mental manusia secara ilmiah yang biasanya dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk memberi penilaian baik-buruk suatu keadaan atau kondisi didalam melaksanakan pekerjaan. Adapun indikator dalam mengukur kemampuan intelektual meliputi :
 - a. Taat menjalankan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta toleransi yang tinggi dalam kehidupan beragama.
 - b. Memiliki semangat yang tinggi dan kejuangan yang tangguh, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.
 - c. Jujur yang dilandasi kesamaan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan serta tanggungjawab yang dipikulnya.
 - d. Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan atas dasar kesamaan lebih mendahulukan kewajiban daripada hak sebagai warga negara.
 - e. Memiliki sikap adaptif dan kritis terhadap pengaruh negative nilai-nilai budaya asing.
 - f. Memiliki kesadaran disiplin nasional sebagai suatu budaya bangsa yang senantiasa ingin maju.
 - g. Memiliki semangat kompetisi yang tinggi dengan meningkatkan motivasi, etos kerja dan produktivitas demi pembangunan bangsa dan negara.
 - h. Berjiwa besar dan berpikiran positif dalam setiap menghadapi permasalahan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi keutuhan dan kemajuan.

- i. Memiliki sifat keterbukaan yang dilandasi rasa tanggung jawab bagi kepentingan bangsa.
- j. Memiliki kesadaran hukum yang tinggi serta menyadari hak dan kewajiban asasinya dengan yang ditetapkan dalam UUD 1945.

Dari beberapa indikator diatas, peneliti mengambil indikator untuk Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu : kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan) dan pendidikan (Muhammad Dawam Rahardjo, 2010:18).

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Berikut dijelaskan mengenai definisi serta indikator pengelolaan keuangan daerah seperti dibawah ini :

2.1.2.1 Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017:6) pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Dadang Suwanda dan Hendri Santosa (2015:17) adalah :

“Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.”

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang tersusun yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2.1.2.2 Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017:6) siklus pengelolaan keuangan daerah meliputi :

1. Perencanaan
Yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah :
 - a. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
 - b. Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
2. Pelaksanaan dan penatausahaan
Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran.
 - b. Neraca.
 - c. Laporan Arus Kas.
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
 Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebelum dilaporkan.
4. Pengawasan
Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan

pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan menurut Dadang Suwanda dan Hendri Santosa (2015:17)

menjelaskan siklus pengelolaan keuangan daerah meliputi :

- a. Perencanaan
Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pengelolaan keuangan daerah serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan otonomi daerah dan menghindari dari ketimpangan permasalahan antar wilayah.
- b. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja, terdapat 2 sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistem penerimaan dan sistem pembayaran.
- c. Penatausahaan
Penatausahaan merupakan prosedur pada saat kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, mencatat, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan.
- d. Pelaporan
Tujuan umum pelaporan keuangan daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan diperiksa oleh BPK dan setelah itu dipertanggungjawabkan ke DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- e. Pertanggungjawaban
Dengan banyaknya regulasi, saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik di tingkat kementerian maupun di tingkat SKPD dituntut 2 jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja.
- f. Pengawasan
Pengelolaan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan mengalami 2 kali pengawasan yaitu dari pihak internal (APIP) dan pihak eksternal (BPK).

Dari beberapa indikator diatas, peneliti mengambil indikator untuk pengelolaan keuangan daerah yaitu : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, pengawasan (Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin, 2017:6, Dadang Suwanda dan Hendri Santosa, 2015:17).

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berikut dijelaskan mengenai definisi serta indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti dibawah ini :

2.1.3.1 Definisi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Muhammad Yusuf (2013:1) laporan keuangan pemerintah daerah adalah :

“Suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada stakeholder yang di dalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen asset yang tercermin dalam neraca (kini dikenal sebagai laporan posisi keuangan) daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran.”

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut Fadillah Amin (2019:156) merupakan :

“Persyaratan normatif yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.”

Selain itu, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut Erlina Rasdianto, dan Omar Sakti Rambe (2015:25) merupakan :

“Suatu hasil dari proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban

entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.”

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang berhubungan dengan transaksi ekonomi yang akan dijadikan sebagai suatu informasi dalam pengambilan keputusan.

2.1.3.2 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:9) terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada :

1. Masyarakat.
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
4. Pemerintah.

2.1.3.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Erlina Rasdianto dan Omar Sakti Rambe (2015:30) terdapat 4 karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas antara lain :

1. Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan yaitu :
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - c. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
 - d. Manfaat prediktif. Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
2. Andal
- Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitu penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas.
3. Dapat dibandingkan
- Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami
- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Selain itu, menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:14) yang memenuhi

karakteristik dari kualitas laporan keuangan yaitu :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
- c. Tepat waktu
- d. Lengkap
- e. Penyajian jujur
- f. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

g. Netralitas

Dari beberapa indikator diatas, peneliti mengambil indikator untuk kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu : relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami (Erlina Rasdianto dan Omar Sakti Rambe, 2015:30).

2.2 Kerangka Pemikiran

Berikut dijelaskan mengenai hubungan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dibawah ini :

2.2.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori menurut Mardiasmo (2002:146) menyatakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002:146). Sementara itu, Soekidjo Notoadmodjo (2009:4) menjelaskan kualitas sumber daya manusia dapat membantu untuk menghasilkan informasi. Sehingga dalam proses pelaporan keuangan sumber daya manusia sangat berperan penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangan (Soekidjo Notoadmodjo, 2009:4). Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan pun otomatis akan meningkat (Soekidjo Notoadmodjo,

2009:4). Selain itu, Teguh Wahyono (2004:12) menyatakan bahwa informasi yang andal sebagai salah satu informasi, keterandalan di sini menyangkut sumber daya manusia yang menghasilkannya, sehingga sumber daya manusia sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai andal.

Hasil penelitian menurut Ni Nyoman Trisnawati dan Dewa Nyoman Wiratmaja (2018) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal tersebut berarti semakin baik kualitas sumber daya manusia maka akan meningkat pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini akan memberikan tambahan bukti empiris bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Ni Nyoman Trisnawati dan Dewa Nyoman Wiratmaja, 2018). Selain itu menurut Agum Gumelar (2017) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Dadang Suwanda (2015) dalam jurnal internasional menyatakan bahwa *quality of Human Resources (HR) has a positive effect but not significant to the quality of local government financial reports. the majority of human resource accounting /financial administration does not have the educational background of accounting.*

Berdasarkan beberapa sumber diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang berkualitas dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia dapat berperan dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, sehingga semakin baik sumber daya

manusia yang berkualitas maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang semakin berkualitas.

2.2.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori menurut Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah (2010:67) menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan (Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010:67). Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010:67). Selain itu, menurut Abdul Halim (2010:4) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah bagian penting untuk pertanggungjawaban yang berbentuk sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan output dari akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik (Abdul Halim, 2010:4). Pemahaman yang dimaksud pada tataran konsep dan teknis akuntansi dan juga sampai kepada pemahaman sistem

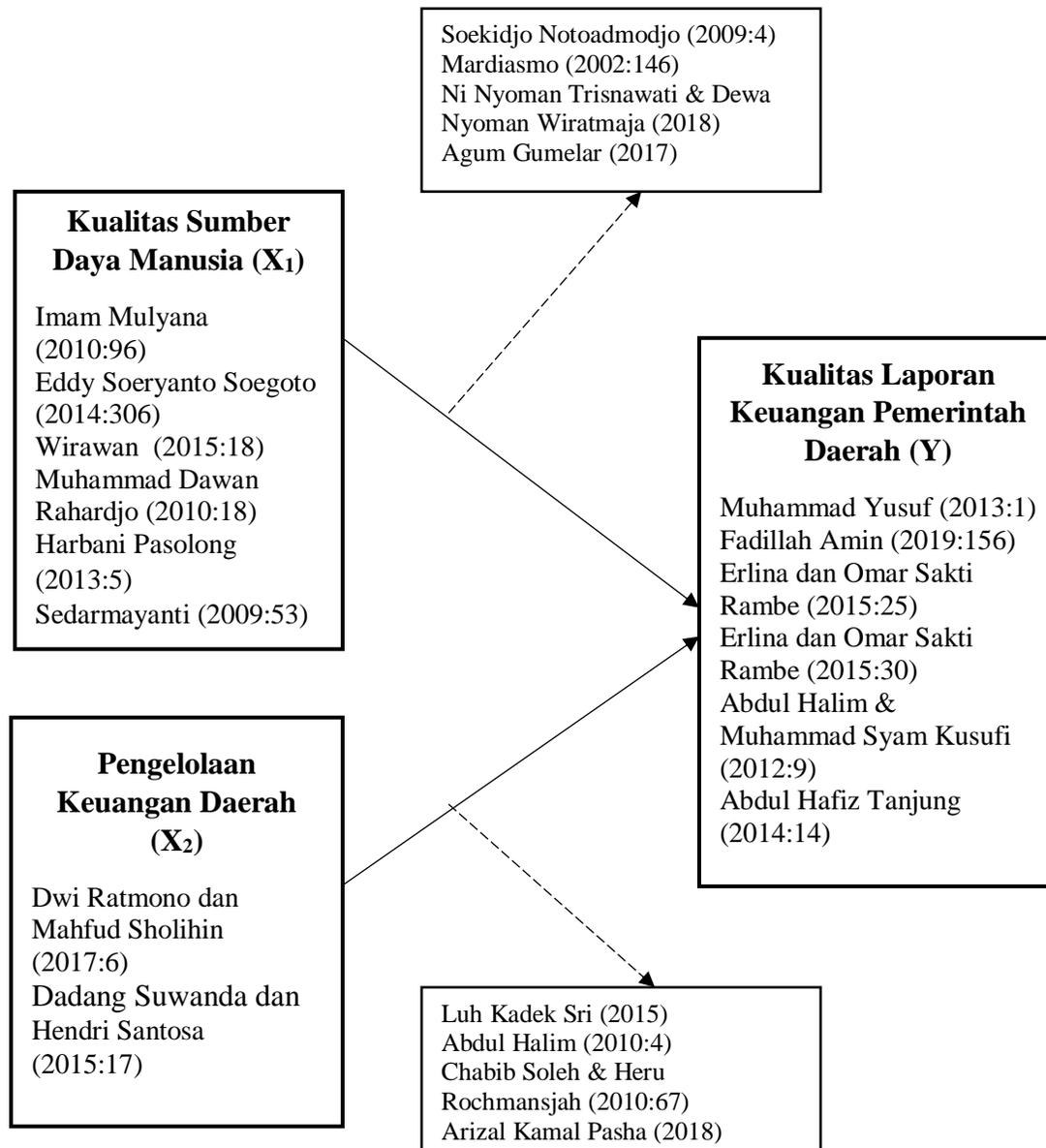
pengelolaan keuangan daerah yang lebih luas seperti peraturan perundang-undangan yang menaungi pengelolaan keuangan daerah itu sendiri (Abdul Halim, 2010:4).

Hasil penelitian menurut Luh Kadek Sri, dkk (2015) menyatakan bahwa pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bahwa semakin efektif dan efisien dalam hal mengelola keuangan daerah maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu penelitian menurut Arizal Kamal Pasha (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa suatu daerah yang mempunyai sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik akan memberikan informasi keuangan yang akurat dan tepat (Arizal Kamal Pasha, 2018). Informasi keuangan yang baik akan mempermudah akuntan dalam menyusun laporan keuangan daerah (Arizal Kamal Pasha, 2018).

Berdasarkan beberapa sumber diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu daerah yang memiliki pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pula. Selain itu jika pengelolaan keuangan dilakukan dengan efektif dan efisien maka dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat sehingga dapat mempermudah dalam menyusun laporan keuangan.

2.2.3 Paradigma Pemikiran

Berikut dibawah ini digambarkan paradigma pemikiran berdasarkan sumber diatas antara lain :



Gambar 2.1
Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.

Untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan pemerintah daerah, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_2 : Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.